

UPAYA PENINGKATAN INVESTASI INDONESIA DI MYANMAR MELALUI DIPLOMASI EKONOMI PASCA DEMOKRATISASI MYANMAR (2011-2013)

Ruth Mona Patricia¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ruthmona91@yahoo.com¹⁾, sukmasushanti@gmail.com²⁾, rainypriadarsini@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

This research is attempting to describe the Indonesia's economic diplomacy to Myanmar after Myanmar's democratic transition, in an effort to increase Indonesia's investment in Myanmar. This qualitative-descriptive research uses the concept of democratization, economic diplomacy, and foreign direct investment (FDI) in explicating the research's result. The initiation of Indonesia's investment in Myanmar was based on the close bilateral relationship between the two countries, especially during the time when Myanmar was transitioning into a democratic country in 2011. Indonesia, through its BUMN, conducts various economic diplomacy efforts to invest in Myanmar including work visits, assessment of cooperation, permit or proposal application, administrative management, tender, MoU draft discussion, correspondence cooperation, direct observation on Myanmar's market, and many others. However, not all of the efforts run smoothly; many obstacles must be overcome. Indonesia's economic diplomacy efforts between 2011-2013 have increased Indonesian investment value in Myanmar from US\$ 241,3million to US\$ 600 million.

Keywords: *Economic Diplomacy, Foreign Direct Investment, Democratization*

1. PENDAHULUAN

Kedekatan hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar telah dimulai pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Myanmar adalah salah satu negara yang turut mendesak diadakannya *Conference on Indonesia Affairs* pada penyelenggaraan *Asian Relation Conference* di New Delhi tahun 1947 yang mengutuk agresi militer Belanda dan mendesak agar Belanda segera menarik diri dari Indonesia. Pada tahun yang sama, Myanmar juga memberikan izin pembukaan *Indonesian Office* di Yangon yang menjadi cikal bakal Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar saat ini (Yani & Sunu, 2007). Myanmar juga senantiasa mendukung posisi

Indonesia, dan bersama-sama dengan Indonesia menyuarkan penghapusan kolonialisme serta hak pembangunan negara berkembang di berbagai forum multilateral (Situmorang, 2012). Ketika Jenderal Ne Win sebagai pimpinan militer Myanmar mengubah ideologi Myanmar menjadi sosialis, hubungan Indonesia dan Myanmar pun masih tetap terjalin meskipun tidak terlalu intensif, ditandai dengan saling kunjung kedua pemimpin negara dalam beberapa kesempatan (Yani & Sunu, 2007).

Kedekatan hubungan dengan Myanmar membuat Indonesia senantiasa berupaya aktif dalam proses penyelesaian (*part of solution*) di Myanmar, dengan mendukung proses demokratisasi di Myanmar dan rekonsiliasi nasional Myanmar, serta mengurangi

keterisolasian Myanmar dari komunitas internasional (Sasongko, 2014). Myanmar pun mempercayakan Indonesia sebagai fasilitator dari proses demokratisasinya. Hal ini dikarenakan latar belakang sejarah dan kedekatan hubungan kedua negara, dan juga pengalaman yang dimiliki Indonesia menuju negara demokratis, khususnya keterkaitannya dengan reformasi di tubuh militer (Situmorang, 2014).

Oleh pemerintah Indonesia, dukungan terhadap proses demokratisasi Myanmar dan segala pencapaian dalam hubungan bilateralnya dengan Myanmar di bidang politik tersebut ternyata dipandang perlu untuk diimbangi dengan diplomasi ekonomi Indonesia guna memperjuangkan kepentingan ekonominya. Diplomasi ekonomi menjadi sesuatu yang perlu karena segala bentuk politik dan kebijakan luar negeri Indonesia serta relasinya dengan negara yang lain tentunya akan berfokus pada kepentingan nasional Indonesia, salah satunya adalah kepentingan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan strategi pencapaian tujuan kepentingan nasional yang tercantum dalam visi politik luar negeri Indonesia, yaitu "memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total" (Suripto, 2012).

Pasca berdemokrasi dan membuka diri, Myanmar menyadari potensi sumber daya alamnya yang melimpah dalam berbagai sektor yang pengembangannya belum dimaksimalkan, seperti sektor pertambangan, perikanan, manufaktur, pertanian, telekomunikasi, dan lain-lain. Myanmar mempunyai hasil tambang yang beragam serta masih terbatas dalam pembangunan infrastrukturnya, khususnya sarana

pendukung ekonomi seperti pelabuhan, jalan, irigasi, bangunan perkantoran dan perumahan. Pada sektor Telekomunikasi, Myanmar juga masih memiliki keterbatasan jaringan telepon untuk menjangkau pedesaan. Hal ini terlihat dari jumlah pengguna telepon di Myanmar sebesar 4,28% dari total populasi. Selain hal di atas, Myanmar masih memiliki banyak potensi di sektor lainnya yang dapat dikembangkan.

Pemerintah Myanmar mulai mempromosikan pengembangan industrinya dari sumber alamnya yang melimpah dan membuat UU investasi asing (FDI) baru yang mengurangi pembatasan aktivitas ekonomi bagi pihak asing (KBRI Yangon, 2015). Kebijakan yang dibuat oleh Myanmar tersebut semakin membuka peluang bagi penetrasi investasi asing yang berguna bagi pembangunan di Myanmar.

Posisi Indonesia yang menguat di mata Myanmar pasca demokratisasi Myanmar serta berbagai peluang kerjasama ekonomi yang muncul yang kemudian menjadi motivasi bagi Indonesia untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hubungan bilateralnya dengan Myanmar, khususnya melalui bidang investasi. Selain karena keuntungan ekonomi yang dihasilkannya, penanaman investasi juga sangat dibutuhkan oleh negara yang baru saja berdemokrasi untuk membangun negaranya setelah terisolasi dari dunia internasional.

Peningkatan nilai investasi Indonesia di Myanmar mulai terlihat, hal ini didasarkan dari data nilai investasi Indonesia di Myanmar pada tahun 2011 dan 2013. Nilai investasi Indonesia di Myanmar sampai akhir tahun 2011 tercatat 241,3 juta US\$, sementara pada

akhir tahun 2013 Indonesia berhasil menanamkan investasi dengan total nilai 600 juta US\$ (Situmorang, 2014). Investasi tersebut berhasil ditanamkan oleh perusahaan Indonesia yang mayoritas adalah BUMN. Keberhasilan investasi ini berada dalam bidang telekomunikasi, infrastruktur, pertambangan dan energi, industri, pertanian, dan lain-lain (Lazuardi, 2014). Kenaikan jumlah investasi Indonesia ke Myanmar sangat signifikan pada rentang waktu kurang lebih 3 tahun tersebut. Hal ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia ke Myanmar dibalik peningkatan nilai investasi tersebut yang dilakukan tepat setelah Myanmar berdemokratisasi pada tahun 2011.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan langkah diplomasi ekonomi suatu negara untuk menjadikan negaranya sebagai mitra kerjasama dunia internasional. Yang kedua meliputi bentuk-bentuk diplomasi ekonomi yang dapat dilakukan oleh suatu negara sebagai langkah dalam menyikapi kondisi negara lain yang baru mengalami proses demokratisasi.

Grimm dkk. dalam tulisannya yang berjudul "*South African Relations with China and Taiwan – Economic Realism and the 'One-China' Doctrine*" memperlihatkan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Afrika Selatan dalam menanggapi kebijakan "*One China Policy*" yang dikeluarkan oleh China.

Afrika Selatan sudah menjalin diplomasi ekonomi yang cukup lama dengan China, Taiwan, dan Hong Kong. Namun setelah China mengeluarkan kebijakan "*One China Policy*", hubungan ekonomi antara Afrika Selatan dengan Taiwan dan Hong Kong menjadi sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan kebijakan China tersebut yang tidak mengakui kemerdekaan Hong Kong dan Taiwan, sehingga hal ini menjadi rintangan tersendiri bagi Afrika Selatan untuk menjalin hubungan ekonomi dengan kedua negara tersebut.

Afrika Selatan dalam Grimm, dkk (2013) disebutkan mempunyai strategi diplomasi ekonomi tersendiri dalam menyikapi kebijakan "*One China Policy*" tersebut, yakni dengan tidak ingin melihat permasalahan yang sedang terjadi dan tidak menghiraukan status pengakuan yang ada atas partner-partner ekonominya. China pada akhirnya tidak mempermasalahkan strategi diplomasi ekonomi Afrika Selatan tersebut selama tidak ada unsur politik yang dilakukan Afrika Selatan. China menganggap hal tersebut sebagai kepentingan nasional masing-masing yang tidak menjadi masalah bagi kebijakan luar negeri China.

Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya sebuah strategi diplomasi ekonomi yang tepat dalam menghadapi transformasi ekonomi politik global. Sementara itu penelitian ini berfokus dari sudut pandang Indonesia yang ingin meningkatkan diplomasi ekonominya dengan Myanmar dalam menyikapi perkembangan ekonomi politik yang terjadi di Myanmar, dengan menanamkan sejumlah investasi langsung di Myanmar.

Seorang profesor dari *The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies* bernama Karl D. Jackson menulis sebuah tulisan berjudul *Myanmar Awakening and U.S. National Interest*. Jackson (2012) mengatakan bahwa Amerika Serikat melihat proses demokratisasi dan keadaan yang terjadi di Myanmar tersebut sebagai peluang yang terbuka bagi negaranya. Myanmar mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang positif, reformasi demokrasi di Myanmar telah terjadi dan trennya terlihat akan terus berlanjut. Jika setelah melihat peluang ini tetap tidak ada respon lanjutan dari Amerika Serikat terhadap Myanmar, maka akan semakin memperkecil keuntungan yang akan didapat Amerika Serikat di saat negara-negara lainnya sudah mencabut sanksi atau embargo mereka terhadap Myanmar (Jackson K. D., 2012). Terdapat beberapa strategi yang dapat diambil oleh Amerika Serikat dalam menyikapi dan mendukung proses demokratisasi Myanmar serta dalam mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat yang dikemukakan oleh Jackson (2012), salah satunya yaitu Amerika Serikat menghentikan sementara waktu kebijakan sanksi ekonomi yang sebelumnya mereka jatuhkan kepada Myanmar pada saat Myanmar dipimpin oleh junta militer. Hal ini dilakukan agar Amerika Serikat dapat mengambil kesempatan atau keuntungan dari perekonomian Myanmar yang sedang bertumbuh dan terbuka lebar bagi masuknya investasi luar negeri.

Kesadaran akan kepentingan nasional yang akhirnya muncul dari Amerika Serikat dalam menyikapi momen demokratisasi Myanmar (setelah selama ini Amerika Serikat

hanya mengambil perannya yang minimal dalam hubungan dengan Myanmar), mempengaruhi peneliti untuk melihat bilamana dari sisi Indonesia dalam melihat peluang mencapai kepentingan nasional saat Myanmar berubah haluan menjadi demokrasi. Penelitian yang terdahulu mendeskripsikan strategi-strategi yang diambil Amerika Serikat terhadap Myanmar, yaitu mendukung upaya pembangunan Myanmar dalam bidang ekonomi, politik, maupun pembangunan. Sementara itu penelitian ini mendeskripsikan dengan lebih mendalam mengenai strategi, peluang, dan hasil dari usaha pencapaian kepentingan nasional Indonesia yang terkhusus hanya dalam bidang ekonomi, yang berupa peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Myanmar dalam bentuk penanaman investasi asing langsung keluar (*outward FDI*) terhadap Myanmar.

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Demokratisasi

Demokratisasi digambarkan sebagai sebuah bentuk perubahan yang cepat maupun perlahan menuju ke arah demokrasi (Meinardus, 2004).

Poin penting yang dapat menandai terjadinya demokratisasi di suatu negara adalah pergantian pemerintahan yang sebelumnya tidak dipilih oleh rakyat menjadi pemerintah yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan yang bebas, adil, dan terbuka (Huntington, 1993). Keseluruhan proses dari demokratisasi umumnya bersifat kompleks dan berkelanjutan. Di dalam proses demokratisasi terjadi beberapa peristiwa seperti berakhirnya rezim non-demokratis,

bangkitnya rezim baru yang demokratis, dan berlanjut pada konsolidasi sistem yang demokratis (Huntington, 1993).

Myanmar baru saja mengalami proses demokratisasi dengan beralihnya rezim junta militer kepada rezim demokrasi. Proses tersebut ditandai dengan terpilihnya Presiden U Thein Sein pada tahun 2011 melalui pemilihan umum sehingga terbentuk pemerintahan demokrasi pertama bagi Republik Uni Myanmar. Pemerintahan demokrasi Myanmar yang baru juga aktif dan giat dalam membuka hubungan yang baru dengan negara-negara lain, khususnya dalam bidang hubungan ekonomi.

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Myanmar pasca demokratisasi semakin membuka diri terhadap dunia internasional dan Indonesia dapat melihat hal ini menjadi suatu kesempatan untuk meningkatkan diplomasi ekonominya dengan Myanmar. Diplomasi ekonomi Indonesia dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai investasi langsung atau FDI Indonesia di Myanmar.

2.2.2. Diplomasi Ekonomi

Dalam ekonomi politik internasional, interaksi antar aktor atau pelaku ekonomi dicapai melalui komunikasi, salah satunya adalah dengan diplomasi. Pavol Baranay (2009) mengatakan bahwa diplomasi ekonomi merupakan aktivitas resmi diplomatik yang berfokus kepada tujuan kepentingan ekonomi suatu negara dalam level internasional. Aktivitas-aktivitas ini mencakup upaya peningkatan ekspor; menarik investasi asing; mengatur negosiasi, kongres, dan pameran; memberikan konseling dan layanan informasi; dan partisipasi kerja dalam berbagai

organisasi ekonomi internasional (Baranay, 2009).

Dalam menyikapi proses berdemokrasinya Myanmar, Indonesia berupaya untuk meningkatkan diplomasi ekonominya dengan Myanmar yang berjangka panjang dan yang bersifat berkelanjutan. Tujuan dari proses diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia yaitu untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dalam hubungan bilateralnya dengan Myanmar, mengingat Myanmar telah mengalami proses demokratisasi dan semakin membuka dirinya bagi masuknya investasi luar negeri untuk mendukung pembangunan negerinya. Berbagai langkah diplomasi ekonomi telah dilakukan oleh Indonesia untuk dapat menanamkan modal atau investasi asing langsung (FDI) di Myanmar.

2.2.3. Investasi Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI)

Foreign Direct Investment atau penanaman investasi asing langsung merupakan arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain (Krugman & Obstfeld, 2004). Keberadaan investasi asing membantu suatu negara penerima investasi dalam berbagai hal, yaitu dalam proses industrialisasi, mengakumulasi modal pembangunan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya sehingga dapat menaikkan kegiatan perekonomian negara tersebut. Bagi negara penanam investasi, keuntungan yang didapat adalah meningkatnya keunggulan

komparatif negara tersebut dalam perdagangan internasional.

Menurut Saputra (2008), FDI dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe berdasarkan arah aliran modal, target, dan motif. Berdasarkan arah aliran modal, terdapat dua tipe FDI, yang pertama adalah *inward* FDI atau FDI masuk, yaitu modal asing yang diinvestasikan kepada kegiatan ekonomi domestik, dan FDI keluar (*outward FDI* atau *OFDI*), yaitu modal domestik yang diinvestasikan di luar negeri. Berdasarkan targetnya, FDI dapat diklasifikasikan sebagai *greenfield investment*, *mergers and acquisitions* (M&A), dan *joint venture*. Dan berdasarkan motif atau alasan melakukan investasi, yaitu: 1) untuk mendapatkan faktor produksi yaitu bahan baku (*resource-seeking*), 2) untuk mendapat akses yang lebih dekat dengan pasar (*market-seeking*), 3) untuk mengurangi biaya serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas (*efficiency-seeking*) setelah dilakukannya investasi bermotif *resource-seeking* atau *market-seeking*, dan 4) untuk mencegah penguasaan atas sumber daya oleh perusahaan pesaing (*strategic asset-seeking*).

Dalam penelitian ini, Indonesia digambarkan sebagai negara yang melakukan FDI keluar atau *outward FDI*, dengan menanamkan modal di Myanmar melalui BUMN Indonesia. Indonesia tergolong dalam negara yang melakukan semua bentuk target FDI di Myanmar, karena BUMN Indonesia mengekspansi kegiatan bisnisnya dengan membentuk sebuah fasilitas operasional baru di Myanmar yang juga mengambil tenaga kerja dari penduduk setempat (*greenfield investment*), dan beberapa BUMN Indonesia

bekerja sama dengan perusahaan lokal Myanmar dalam membangun berbagai sektor investasi di Myanmar (*joint ventures*), bahkan juga mengambil alih saham perusahaan lokal untuk dapat menjalankan investasinya di Myanmar (*mergers and acquisitions*). Indonesia pun terlihat mempunyai ke-empat motif FDI dalam penanaman investasi yang dilakukannya. Semua posisi Indonesia dalam klasifikasi FDI ini akan lebih terlihat di dalam pembahasan dalam penelitian ini.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menjelaskan secara sistematis dan menganalisa upaya peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Myanmar pasca demokratisasi Myanmar tahun 2011-2013. Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari sumber yang sudah ada, berbentuk buku, *e-book*, artikel dalam jurnal ilmiah, *conference paper*, publikasi pemerintah, serta laporan-laporan dalam website resmi lembaga atau organisasi yang terkait. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi atau studi kepustakaan, kemudian dianalisa dengan menggunakan kerangka konseptual dan disajikan dalam bentuk teks maupun tabel sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai hal ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Demokratisasi Myanmar Sebagai Momentum Investasi Indonesia di Myanmar

Masa-masa berkuasa junta militer selama kurang lebih 50 tahun membuat Myanmar terpuruk dalam berbagai bidang, khususnya dalam perekonomian, karena pemerintahan junta militer lebih mementingkan pengeluaran dalam bidang militer dibandingkan kesejahteraan dan pembangunan Myanmar (Apriyanti, 2014). Hingga pada tahun 2011 saat Myanmar sedang berada dalam proses peralihan kekuasaan junta militer menuju ke arah demokrasi, Indonesia berkomitmen penuh untuk mendukung proses demokratisasi di Myanmar dan rekonsiliasi nasional Myanmar, serta terus berupaya mengurangi keterisolasian Myanmar dari komunitas internasional (Sasongko, 2014).

Setelah beralih dari rezim junta militer kepada rezim demokrasi pada awal tahun 2011, Myanmar berusaha untuk bangkit dari perekonomiannya yang terpuruk akibat pemerintahan otoriter junta militer selama ini. Salah satu cara yang dilakukan yaitu pemerintah Myanmar di bawah pemerintahan Presiden U Thein Sein merevolusi kebijakan mengenai investasi luar negeri, sehingga menyebabkan terbukanya kesempatan sebesar-besarnya bagi investor luar negeri termasuk bagi Indonesia untuk dapat menanamkan modal yang dapat menjadi mesin penggerak bagi perekonomian dan pembangunan Myanmar (CRI, 2013).

Kedekatan hubungan bilateral kedua negara di bidang politik yang selama ini telah terjalin juga membuat Indonesia mulai menyadari untuk mengimbangnya dengan diplomasi ekonomi yang tajam guna kepentingan ekonomi nasional Indonesia (Sambuaga, 2012). Investasi politik yang telah dilakukan Indonesia dengan Myanmar selama

ini kemudian diterjemahkan menjadi investasi dengan nilai ekonomi. Melalui momen ini pemerintah Indonesia pun secara internal mendorong dan menghimbau kepada badan usaha yang dimiliki negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mencoba berekspansi dan berinvestasi di Myanmar (Saputra, 2012). BUMN Indonesia secara perlahan mulai mengekspansi kegiatan ekonominya dengan menanamkan investasi langsung ke berbagai sektor potensial di Myanmar, seperti sektor perbankan, semen, dan infrastruktur (JPNN, 2012).

4.2. Potensi Investasi di Myanmar

Myanmar mempunyai berbagai potensi atau faktor-faktor penarik yang dapat menciptakan peluang kerjasama investasi antara Indonesia dengan Myanmar. Potensi sumber daya alam Myanmar yang belum seluruhnya tereksplorasi, sumber daya manusia yang cukup dengan upah tenaga kerja yang murah, lokasi pasar yang cukup besar, serta sektor-sektor lain merupakan peluang yang terbuka untuk dikembangkan oleh investor Indonesia. Selain itu, sektor-sektor investasi yang ditawarkan oleh Myanmar umumnya sejenis dengan Indonesia seperti penanaman modal di sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan, energi dan pertambangan, serta pariwisata. Tersedianya sumber daya alam yang belum tereksplorasi dan kesamaan kedua negara dalam sektor investasi menjadi motivasi kuat bagi investor dari Indonesia untuk mengembangkan sayapnya ke Myanmar (Boy, 2014).

Myanmar memiliki banyak potensi investasi yang terdapat di berbagai sektor,

seperti sektor komoditas, industri manufaktur, infrastruktur, pariwisata atau perhotelan, serta sektor telekomunikasi. Dari sekian banyak sektor-sektor di Myanmar yang memiliki potensi bagi masuknya investasi luar negeri, hanya ada beberapa sektor yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menanamkan investasinya di Myanmar. Sektor yang dituju oleh Indonesia untuk penanaman investasi yaitu; sektor komoditas bidang energi dan pertambangan, sektor kelistrikan, sektor telekomunikasi, sektor transportasi, sektor industri manufaktur, sektor infrastruktur, dan sektor perbankan.

4.3. Kebijakan Investasi Pemerintah Myanmar

Myanmar membuat undang-undang khusus mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) yang disahkan pada tanggal 2 November 2012. Undang-undang ini dibuat agar dapat menarik lebih banyak investasi luar negeri masuk ke Myanmar. Melalui UU FDI tersebut, Myanmar juga membentuk suatu komisi yang mengatur penanaman modal asing di Myanmar yaitu *Myanmar Investment Commission* (MIC). MIC mempunyai beberapa tanggung jawab dalam hal penanaman investasi, yakni sebagai berikut: (1) melindungi para investor sesuai dengan peraturan atau ketentuan investasi yang baru; (2) menjaga dan memelihara konservasi lingkungan; (3) menekankan pentingnya dampak sosial; (4) melaksanakan penganggaran atau penghitungan dan audit sesuai dengan standar internasional terkait permasalahan finansial, termasuk tentang transparansi dan akuntabilitasnya; (5) menciptakan peluang-peluang kerja; (6)

memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan atau perburuhan yang berlaku; (7) mendukung adanya tanggungjawab sosial korporasi (*Corporate Social Responsibilities* atau CSR); dan (8) melaksanakan transfer teknologi (KBRI Yangon, 2015). Hadirnya *Myanmar Investment Commission* (MIC) merupakan hal yang positif dari reformasi ekonomi yang terus dilakukan Pemerintah Myanmar dibawah kepemimpinan Presiden U Thein Sein. Melalui MIC diharapkan segala hal mengenai penanaman investasi luar negeri di Myanmar menjadi jelas dan teratur sehingga dapat lebih memacu masuknya modal atau investasi luar negeri ke Myanmar.

4.4. Analisa Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Myanmar dalam Peningkatan Investasi Indonesia di Myanmar

Indonesia secara serius telah membangun hubungan ekonomi dalam hal investasi dengan Myanmar. Dalam upaya meningkatkan nilai investasinya di Myanmar dari tahun 2011 sampai 2013, Indonesia mendapatkan nilai peningkatan investasi yang cukup besar di Myanmar, yakni sebesar US\$ 358,5 juta. Dalam Tabel 3.1 berikut terdapat bentuk-bentuk investasi yang berhasil ditanamkan oleh BUMN Indonesia di Myanmar selama rentang tahun 2011-2013 pasca Myanmar berdemokrasi.

Tabel 4.1

Penanaman FDI Indonesia di Myanmar Tahun 2011-2013

Sektor Investasi di Myanmar	FDI Indonesia pada Sektor Investasi Myanmar
-----------------------------	---

Sektor energi dan pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Timah membangun penambangan timah dan fasilitas pengolahan bahan mineral (<i>smelter</i>) di Pubyien-Tamok, Tanihary, Myanmar. 2. PT. Bukit Asam membangun PLTU dengan sistem <i>joint venture</i> dengan satu perusahaan Myanmar. 3. PT. Pertamina membangun 1.360 SPBU dengan sistem <i>joint venture</i> dengan <i>Myanmar Petroleum Products Enterprise</i>.
Sektor kelistrikan	PT. PLN membangun <i>power plant</i> dengan suplai batubara dari Indonesia.
Sektor telekomunikasi	PT. Telkom memenangkan tender untuk membangun jaringan telekomunikasi bawah laut perbatasan Myanmar-India, dan menggarap layanan ICT (<i>Information Communication Technology</i>) lisensi seluler.
Sektor transportasi	PT. <i>Garuda Maintenance Facility</i> menggarap perbaikan atau pemeliharaan pesawat-pesawat yang dimiliki <i>Myanmar Airways International</i> .
Sektor industri manufaktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Semen Indonesia membangun pabrik pembuatan semen 2. PT. Pupuk Indonesia membangun pabrik pembuatan pupuk
Sektor infrastruktur	PT. Wijaya Karya membangun pabrik beton pra-cetak dengan sistem <i>joint venture</i> dengan perusahaan <i>United Mercury Group (UMG)</i> , dan membangun proyek residensial & perkantoran dengan sistem <i>joint venture</i> dengan perusahaan <i>Noble Twin Dragons Pte Ltd (NTD)</i> .
Sektor perbankan	PT. BNI membuka kantor cabangnya di Myanmar.

Sumber: (KBRI Yangon, 2015)

Dibalik besarnya hasil peningkatan nilai investasi Indonesia di Myanmar pada rentang tahun 2011-2013 tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi demi mendorong peningkatan jumlah investasi di Myanmar. Upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia pada Myanmar yakni berbentuk kunjungan kenegaraan, pendekatan, serta penjajakan mengenai peluang-peluang yang ada agar kerjasama ekonomi kedua negara dapat ditingkatkan. Dalam *Progress Report* yang disusun oleh KBRI Yangon (2014) mengenai program peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi Indonesia-Myanmar, Indonesia melalui setiap BUMN-nya yang terkait telah melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi terhadap Myanmar sepanjang rentang tahun 2011-2013, yang akan dirangkum di dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Bentuk Diplomasi Ekonomi oleh BUMN Indonesia di Myanmar

Sektor	Bentuk Diplomasi Ekonomi
Energi dan pertambangan	PT. Timah Tbk. - Melakukan pengajuan proposal yang menyatakan keinginan untuk bekerjasama dalam upaya eksplorasi bersama terkait timah di Pubyien-Tamok, Tanihary, Myanmar. - Melakukan proses administrasi guna mendapatkan lahan untuk pertambangan dan pembangunan <i>smelter</i> di daerah Pubyien-Tamok, Tanihary, Myanmar

	<p>seluas 10.000 hektar</p> <p>PT. Aneka Tambang Tbk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survei geologi di Mandalay dan mengajukan ijin untuk melakukan eksplorasi pertambangan emas dan tembaga, bekerjasama dengan <i>local partner</i> atau melalui akuisisi perusahaan tambang yang sudah beroperasi. 		<p><i>satellite</i> di Myanmar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendirikan <i>Representative Office</i> di Myanmar sebagai cikal bakal kantor cabang jika lisensi sebagai operator sudah diperoleh.
	<p>PT. Bukit Asam Tbk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merintis kerjasama dalam bentuk pengembangan tambang batubara dan pembangunan pembangkit listrik bertenaga uap (<i>coal-fired plant</i>) di Myanmar 	Transportasi	<p>PT. Pelabuhan Indonesia II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan beberapa kali kunjungan ke Myanmar guna menjajaki peluang pengoperasian beberapa pelabuhan di Myanmar - Mengadakan pembicaraan dengan <i>Myanmar Port Authority</i> pada tanggal 16 Mei 2013 untuk membahas <i>draft MoU</i> pengembangan 3 (tiga) pelabuhan di daerah Thilawa-Yangon
	<p>PT. Pertamina (Persero)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kerjasama dengan Myanmar dalam bentuk pembangunan <i>refinery</i> baru dan pengembangan lapangan minyak dan gas di Myanmar 		<p>PT. Garuda Indonesia Tbk Maintenance Facility Aero Asia (GMFAA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan kerjasama dengan pemerintah Myanmar untuk perbaikan atau pemeliharaan 4 pesawat Airbus A-320 yang dimiliki oleh <i>Myanmar International Airlines (MIA)</i> - Berupaya mengadakan komunikasi dengan pihak MIA terkait dengan persetujuan proposal dan <i>update schedule maintenance</i> di tahun 2013, serta komunikasi dengan pihak otoritas penerbangan sipil Myanmar
Telekomunikasi	<p>PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kunjungan kerja ke <i>Minister of Communications, Posts and Telegraphs (MCPT)</i> pada tanggal 24 September 2012 untuk menjajaki peluang kerjasama untuk membangun sambungan jaringan GSM hingga 30 juta unit dari 2 juta unit yang ada. - Melakukan upaya untuk mendapatkan salah satu <i>lisence</i> 		

	(DCA/ <i>Department of Civil Aviation</i>) untuk audit terhadap fasilitas yang dimiliki GMFAA, sebelum pesawat dari Myanmar dirawat oleh GMFAA		perdagangan terlebih dahulu sebagai langkah awal dalam meningkatkan akses penetrasi ke Myanmar
Perbankan	<p>PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuka hubungan kerjasama korespondensi dengan beberapa perbankan di Myanmar, yaitu MFTB, MICB, Cooperative Bank, dan Kanbawza Bank - Melakukan penempatan staf <i>Business Representative Officer</i> (BRO) pada salah satu bank tersebut dengan tujuan <i>sharing knowledge</i> dan mengeksplor potensi bisnis transaksi internasional yang dapat dilakukan antara BNI dengan bank tersebut 	Infrastruktur	<p>PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani MoU dengan <i>United Machinery Group of Companies</i> (UMG) Myanmar untuk pembangunan pabrik beton pra-cetak di Yangon - Membuka <i>liaison office</i> di kota Yangon pada bulan September yang diharapkan dapat memudahkan komunikasi dengan pihak Myanmar
Industri	<p>PT. Semen Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kunjungan ke Myanmar pada tanggal 24-27 September 2013 dengan tujuan mengamati langsung kondisi pasar di Myanmar dan membicarakan potensi kerjasama di bidang semen dengan mitra setempat - Bekerjasama dengan mitra setempat yaitu <i>Myanmar International Trading Co.</i> (MITC) untuk melakukan 	Kelistrikan	<p>PT. PLN (Persero)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penetrasi melalui program <i>capacity building/</i> peningkatan kapasitas yang dituangkan dalam MoU antara PT. PLN dengan Kementerian Kelistrikan Republik Uni Myanmar mengenai <i>energy efficiency</i> - <i>General Manager</i> PT. PLN melakukan kunjungan ke Myanmar bulan September 2013 dan menemui Menteri Kelistrikan Myanmar di Yangon membahas program kerjasama <i>energy loss</i>, pengembangan <i>Clean Technology Coal Fired Power Plant</i> dan <i>Pre-assessment</i> kapasitas pembangkit listrik di Tigyt dimana PT. PLN akan bekerjasama

	dengan <i>Department of Hydropower Generation Enterprise</i> (DHGE) dan Khin Maung Nyunt <i>Trading Company</i>
--	---

Sumber: Situmorang (2014),

Analisa mendalam terhadap usaha-usaha Indonesia untuk terlibat dalam perekonomian Myanmar menunjukkan bahwa investasi-investasi Indonesia di Myanmar dapat dikatakan tepat sasaran. Sebagai contohnya, keputusan PT. PLN untuk berinvestasi di Myanmar merupakan langkah yang tepat karena salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi di Myanmar adalah ketersediaan energi listrik. Cadangan energi listrik dalam jumlah besar untuk operasional sehari-hari adalah kebutuhan dasar bagi sebuah negara yang ingin memperbanyak kegiatan ekonominya. Sayangnya, lebih dari tiga perempat jumlah penduduk di Myanmar masih belum mendapatkan pasokan listrik yang memadai, sehingga masalah ketersediaan energi listrik ini menjadi salah satu hambatan besar bagi perkembangan perekonomian Myanmar (Calderon, 2013). Oleh karena itu, keputusan PT. PLN untuk membangun pabrik pembangkit tenaga listrik serta menyediakan suplai batu bara untuk Myanmar merupakan langkah yang sangat tepat, karena keputusan itu secara langsung mendorong pertumbuhan perekonomian Myanmar serta menjadi lahan baru bagi pengembangan kegiatan perekonomian Indonesia. Pada akhirnya, investasi ini akan memiliki masa depan yang panjang serta membawa profit yang berkelanjutan bagi Indonesia dan juga

Myanmar karena investasi ini berakar pada salah satu faktor fundamental untuk kelangsungan negara Myanmar, yaitu energi listrik.

Dari semua upaya peningkatan investasi Indonesia yang dilakukan oleh BUMN-BUMN Indonesia di Myanmar, terlihat berbagai jenis bentuk diplomasi ekonomi yang telah dilakukan untuk dapat mengekspansi kegiatan ekonomi ke Myanmar, yaitu; kunjungan kerja, peninjauan kerjasama, pengajuan ijin dan proposal, pengurusan administrasi, mengajukan tender, pembukaan *representative* atau *liaison office*, pembahasan draft MoU, membuat kerjasama korespondensi, mengamati kondisi langsung pasar di Myanmar, dan berbagai macam bentuk diplomasi ekonomi lainnya terkait penanaman investasi. Diplomasi ekonomi ini akan terus dilakukan oleh Indonesia selama masih adanya investasi yang tertanam di Myanmar, dengan harapan investasi tersebut akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi Myanmar pasca berdemokrasi. Pemerintah Indonesia secara politis selalu mendukung langkah-langkah BUMN Indonesia serta melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi level *G-to-G* (setingkat pemerintah) dengan Pemerintah Myanmar untuk mendukung langkah-langkah BUMN Indonesia menanamkan modalnya di Myanmar.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Myanmar yang semakin berkembang dalam hal investasi memberi keuntungan secara politis bagi kedua negara. Bagi Myanmar, investasi yang telah ditanamkan oleh Indonesia dapat dikatakan sebagai bukti kehadiran peran Indonesia dalam perjuangan

proses demokratisasi dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Myanmar (Iskan, 2013). Keberadaan investasi Indonesia di Myanmar dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perjuangan pemerintahan baru Myanmar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Myanmar dalam berbagai bidang. Efek lain dari keberadaan investasi tersebut yaitu Myanmar dapat mengurangi impor, terjadinya transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan menimbulkan “*spill over effect*” atau pelimpahan kepada perusahaan lokal atau sektor lain dalam perekonomian Myanmar.

Bagi Indonesia, keberadaan investasinya di Myanmar semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara terdepan yang memimpin di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN sebagai organisasi, dengan kekuatan serta pertumbuhan ekonomi yang terbesar di ASEAN. Jika investasi Indonesia di Myanmar tidak pernah ada, hal tersebut tentu akan memberikan pandangan buruk terhadap nama baik Indonesia, karena bentuk dukungan dan bantuan politik yang selalu diberikan Indonesia tidak sejalan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Myanmar pasca demokratisasi.

Seperti halnya keberadaan investasi asing atau FDI yang terdapat di suatu negara, keberadaan investasi dari badan usaha milik suatu negara pada suatu *host country* dapat pula memberi dampak negatif. Adanya suatu investasi asing tentunya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah *host country* tersebut (Mas'ood, 1997). Terkadang, ketika kepentingannya terancam, maka negara asal

investasi tersebut atau *home country* sampai melakukan intervensi ke dalam urusan politik dalam negeri *host country*. Keberadaan badan usaha milik negara Indonesia di Myanmar memang belum menunjukkan pengaruh langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Myanmar. Namun ketika investasi berkelanjutan pada waktu yang lama dan situasi ini nantinya berlangsung, terdapat kemungkinan bahwa keberadaan BUMN Indonesia di Myanmar akan dapat mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar, baik dalam bidang investasi atau bahkan dalam bidang lainnya yang terdapat di Myanmar.

Bagi Indonesia sebagai *home country*, penanaman modalnya di Myanmar juga mempunyai kemungkinan berdampak buruk bagi negaranya sendiri. Tindakan penanaman modal di negara lain atau *outward investment* dapat menghilangkan lapangan pekerjaan di negara asal (Mas'ood, 1997). Namun dampak negatif ini dapat diminimalisir dengan menyertakan juga sumber daya manusia yang berasal dari *home country* di dalam perusahaan, meskipun terkadang hanya pada bagian pekerjaan profesional, tata usaha, dan jasa, karena pada pekerjaan rutin sederhana seperti bagian perakitan, pengetikan komputer, dan pekerjaan rutin lainnya akan mempekerjakan pekerja lokal dari *host country* yang menawarkan upah buruh lebih murah.

5. KESIMPULAN

Hubungan bilateral yang dekat antara Indonesia dan Myanmar yang sudah terjalin selama puluhan tahun turut menjadi faktor

yang diperhitungkan Indonesia dalam menentukan langkahnya untuk menanamkan investasi di Myanmar. Memperhatikan karakteristik Myanmar, termasuk sistem perekonomiannya yang belum *well established*, peran Pemerintah Indonesia melalui *engagement* dengan Pemerintah Myanmar diyakini akan sangat membantu keberhasilan bisnis BUMN Indonesia di Myanmar.

Pasca berdemokrasi, Myanmar membuat reformasi dalam banyak hal, termasuk membuat kebijakan mengenai investasi yang dinilai menguntungkan dan jelas, serta menyediakan fasilitas-fasilitas yang seakan membuka pintu yang lebar bagi para investor luar negeri untuk masuk dan mengeksplor berbagai sektor yang belum dimaksimalkan pembangunannya di Myanmar. Hal ini turut menjadi kemudahan bagi Indonesia dalam menanamkan investasi langsungnya di Myanmar.

Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah nilai investasi di Myanmar, berbagai langkah diplomasi ekonomi yang spesifik telah dilakukan oleh Indonesia di Myanmar melalui BUMN-nya. Kesemuanya dapat menunjukkan adanya upaya yang tinggi dari BUMN Indonesia untuk terus meningkatkan nilai investasi Indonesia di Myanmar serta mendorong kemajuan pembangunan di Myanmar, meskipun di dalam perjalanan diplomasi ekonomi ada berbagai dinamika yang terjadi.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Myanmar yang semakin berkembang dalam hal investasi memberi beberapa keuntungan secara politis maupun strategis bagi kedua negara. Namun keberadaan investasi itu

sendiri juga memungkinkan untuk memberikan dampak negatif baik bagi Indonesia sebagai *home country* maupun bagi Myanmar sebagai *host country*, meskipun dampak tersebut kini belum terlihat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, D. (2014). Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013). *Jom Fisip*, 1.
- Baranay, P. (2009). *Modern Economic Diplomacy*. Latvia: Publications of Diplomatic Economic Club.
- Boy. (2014, December 19). *Dubes Ito Optimis Hubungan Bisnis Indonesia-Myanmar Kian Terbuka*. Retrieved November 17, 2015, from JPNN.com: <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=276574>
- CRI. (2013, 8 14). *Reformasi Myanmar Berkembang*. Retrieved September 19, 2016, from CRI Online: <http://indonesian.cri.cn/201/2013/08/14/1s141010.htm>
- Grimm, S., Kim, Y., Anthony, R., Attwell, R., & Xiao, X. (2013). South Africa's relations with China and Taiwan: Economic realism. *Centre for Chinese Studies*, 1-4.
- Huntington, S. P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Iskan, D. (2013, June 17). *Dahlan Iskan Ingin BUMN dan Swasta Investasi di Myanmar*. Retrieved September 27, 2016, from Detik Finance: <http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2275898/dahlan-iskan-ingin-bumn-dan-swasta-investasi-di-myanmar>

- Jackson, K. D. (2012). *Myanmar Awakening and U.S. National Interest*. Washington: Paul H. Nitze School of Advanced International Studies.
- JPNN. (2012, April 7). *BUMN Incar Investasi di Myanmar*. Retrieved June 8, 2016, from JPNN.com: <http://www.jpnn.com/read/2011/10/24/106450/index.php?mib=berita.detail&id=123452>
- KBRI Yangon. (2015). *Buku Panduan Sekilas Potensi Myanmar*. Yangon: Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- KBRI Yangon. (2014, August). Buletin Komunitas ASEAN. *Kesiapan Myanmar Menyongsong Terwujudnya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015*, p. 12.
- Krugman, P. L., & Obstfeld, M. (2004). *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (5 ed.). Jakarta: Indeks.
- Lazuardi, H. (2014, December 21). *KBRI Myanmar Fasilitas Kerja Sama Bisnis Dan Investasi*. Retrieved September 27, 2016, from E-Paper Bisnis Indonesia - Industri: <http://industri.bisnis.com/read/201412/21/12/384686/kbri-myanmar-fasilitas-kerja-sama-bisnis-dan-investasi>
- Mas'oed, M. (1997). *Perusahaan Multinasional dalam Ekonomi-Politik Internasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Meinardus, R. (2004). *Democracy and Democratization*. Liberal Library.
- Sambuaga, T. L. (2012, September 26). *Indonesia Urged to Invest in Myanmar*. Retrieved March 29, 2015, from Jakarta Globe: <http://jakartaglobe.beritasatu.com/archive/indonesia-urged-to-invest-in-myanmar/>
- Saputra, D. (2012, March 9). *Empat BUMN Lebarkan Sayap Bisnis ke Myanmar*. Retrieved June 8, 2016, from Portal Nasional Republik Indonesia: <http://www.indonesia.go.id/in/kesehatan/10737?task=view&start=10>
- Saputra, R. D. (2008). Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015. In B. Indonesia, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* (pp. 173-182). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sasongko, A. (2014, May 12). *Myanmar Puji Peran Indonesia di ASEAN*. Retrieved February 21, 2015, from Republika Online: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/05/12/n5gk3b-myanmar-puji-peran-indonesia-di-asean>
- Situmorang, G. (2014). *Background Information: Hubungan Bilateral RI-Myanmar*. Yangon: KBRI Yangon.
- Situmorang, G. (2012). *Policy Paper - Reorientasi dan Penajaman Diplomasi Indonesia Terhadap Myanmar*. Yangon: Dit. Astimpas / Kemlu RI.
- Suripto, E. A. (2012). Refleksi Politik Luar Negeri Republik Indonesia. *Jurnal Diplomasi*, 4 (1), v.
- Yani, & Sunu. (2007, January 21). *KBRI Yangon: Hubungan RI - Myanmar Sepanjang Masa*. Retrieved Maret 4, 2015, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <http://www.kemlu.go.id/Pages/Embassies.aspx?IDP=113&l=id>